

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara membawa perubahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Perubahan tersebut ditandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengakibatkan terjadinya perubahan paradigma di dalam pengelolaan keuangan negara.

Posisi bendahara sangat penting disetiap instansi pemerintahan. Hal ini berdasarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Anggaran dan Belanja Negara pada pasal 30 ayat (1) dimana bendahara melakukan penyelenggaraan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pada Satker. Aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar pembukuan oleh bendahara terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara pasal 1, bendahara

pengeluaran dapat melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pelaporan atas keperluan belanja negara dalam melaksanakan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Dari pengertian tersebut tersurat “5M” fungsi bendahara pengeluaran, yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan. Uang yang diterima oleh bendahara pengeluaran berasal dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), pungutan pajak atas pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, dan pendapatan lain yang menjadi hak negara.

Dalam menatausahakan, bendahara melakukan seluruh pengeluaran, pemasukan, dan pembayaran yang telah dilakukan oleh satuan kerja terkait. Penatausahaan dilakukan dengan cara mencatat seluruh transaksi yang terkait dengan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran uang yang terjadi di satuan kerja dalam suatu buku. Pencatatan transaksi oleh bendahara pengeluaran disebut sebagai pembukuan bendahara pengeluaran. Setelah menatausahakan, tugas bendahara pengeluaran yang terakhir adalah mempertanggungjawabkan. Secara fungsional, bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)/KPPN. Selain itu, selaku pejabat yang diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga, bendahara pengeluaran juga harus menyampaikan pertanggungjawaban kepada menteri/pimpinan lembaga. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran sebagai wujud pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya, disusun berdasarkan pembukuan yang telah dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam tugas akhir ini dengan judul **“MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN di KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG”**



1.2 Rumusan Masalah

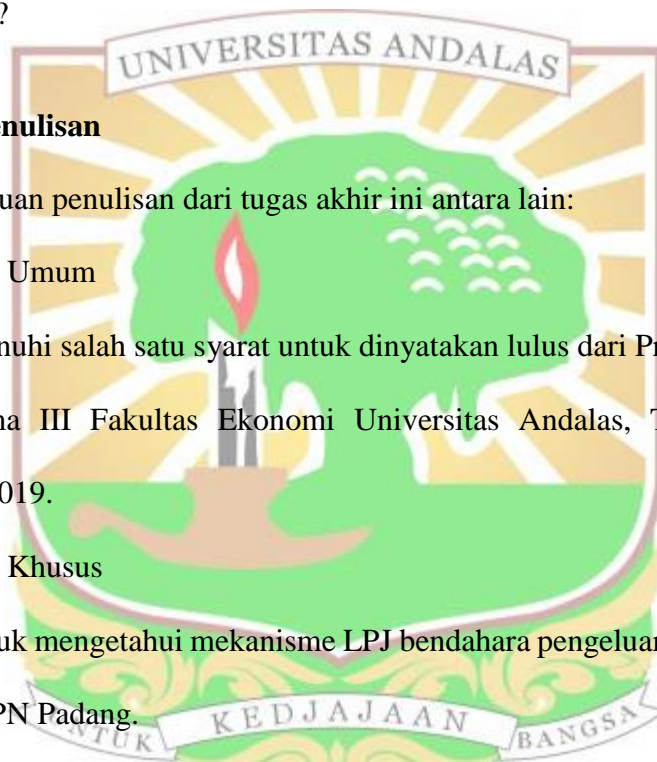
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan LPJ bendahara pengeluaran pada satuan kerja di KPPN Padang ?
2. Bagaimana pelaporan LPJ bendahara pengeluaran satuan kerja di KPPN Padang ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dari tugas akhir ini antara lain:

1. Tujuan Umum
Memenuhi salah satu syarat untuk dinyatakan lulus dari Program Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Tahun Akademik 2018/2019.
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk mengetahui mekanisme LPJ bendahara pengeluaran satuan kerja di KPPN Padang.
 - b. Untuk mengetahui pelaporan LPJ bendahara pengeluaran satuan kerja di KPPN Padang.



1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan ini antara lain :

- a. Bagi pihak KPPN Padang, hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan.

b. Bagi Penulis

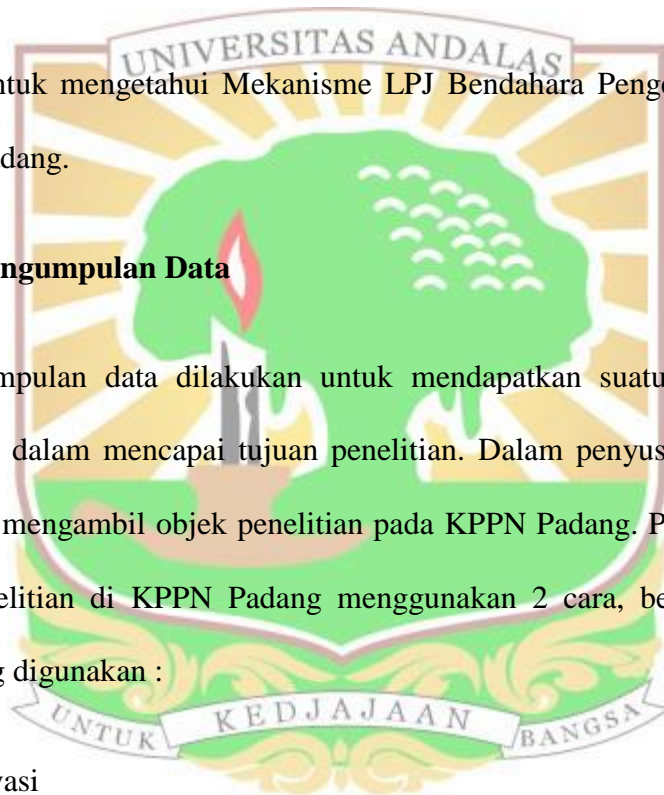
1. Menambah dan memperkaya pengetahuan penulis mengenai pencatatan dan pelaporan laporan pertanggungjawaban bendahara pada suatu instansi.
2. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program Akuntansi di Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Untuk mengetahui Mekanisme LPJ Bendahara Pengeluaran di KPPN Padang.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mengambil objek penelitian pada KPPN Padang. Pengumpulan data dalam penelitian di KPPN Padang menggunakan 2 cara, berikut merupakan uraian yang digunakan :

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Observasi juga bisa diartikan sebagai proses yang kompleks. Pengumpulan data yang dilakukan di KPPN Padang.



2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka langsung dengan narasumber serta melakukan tanya jawab langsung. Wawancara dilakukan dengan kepala seksi verifikasi dan akuntansi (Kamis, 28 Maret 2019 dan 18 April 2019) dan yang berhubungan dengan data yang terkait, seperti dokumentasi, pengumpulan data dengan merekap dan melihat dokumen-dokumen yang terkait, dengan arti lain bahwa dokumentasi sebagai pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik, digunakan sebagai mendukung kelengkapan data yang lain

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang yang mengungkapkan ulasan pemilihan topik rumusan masalah yang merupakan dasar isi dan pembahasan. Tujuan penulis, rumusan masalah, manfaat yang diterima oleh penulis maupun pihak lain, dan sistematika pelaporan yang berisi tentang hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam tugas akhir secara umum.

Bab II : Landasan Teori

Menjelaskan tentang mekanisme laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran di KPPN Padang.

Bab III : Gambaran Umum KPPN Padang

Memberikan gambaran tentang instansi yang terkait mulai dari sejarah berdirinya, letak geografisnya, visi, misi, tugas pokok dan fungsi serta janji layanan, struktur organisasi, tugas dan uraian pekerjaan masing-masing seksi di KPPN Padang.

Bab IV : Pembahasan

Memberikan penjelasan tentang mekanisme laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran di KPPN Padang.

Bab V : Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil pengamatan keseluruhan dari pelaksanaan yang telah dilakukan.

